

## PERKEMBANGAN PERKEBUNAN TEBU JATIBARANG DI BREBES TAHUN 1975-1996

Oleh: Iftiyah, Prodi IlmuSejarah, JurusanPendidikanSejarah, FakultasIlmuSosial, UniversitasNegeri Yogyakarta, [iftiyah22@gmail.com](mailto:iftiyah22@gmail.com)

### ABSTRAK

*Gula merupakan agroindustri tertua yang berada di Pulau Jawa. Keuntungan yang besar menjadikan banyak bermunculan pabrik gula, terutama di Pulau Jawa. Berbicara mengenai pabrik gula tidak akan lepas dari perkebunan tebu. Sebab tebu merupakan bahan produksi dalam sebuah pabrik gula. Salah satu pabrik gula besar di Jawa adalah Pabrik Gula Jatibarang. Pabrik tersebut terletak di Jalan Jatibarang-Slawi, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sebagai pabrik gula besar sudah pasti memiliki lahan perkebunan tebu yang luas. Perkebunan tebu yang digiling di pabrik tersebut lebih dikenal dengan nama perkebunan Jatibarang. Perkebunan yang luas inilah yang menarik untuk dikaji dalam penulisan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi umum Kabupaten Brebes di tahun 1975-1996. Selain itu juga untuk mengetahui perkebunan tebu yang ada beserta aspek yang melingkupinya. Serta mengetahui bagaimana dampak dari adanya perkebunan tebu Jatibarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan yang dimiliki Kabupaten Brebes cocok digunakan untuk pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan tebu. Perkebunan tebu mulai berkembang pesat setelah adanya INPRES tahun 1975 mengenai TRI. Hal tersebut dikarenakan kebebasan yang diberikan pemerintah kepada petani untuk mengolah tanahnya sendiri dengan ditanami tebu. Perkebunan tebu Pabrik Gula jatibarang terletak di dataran rendah. Perkebunan mulai berpindah ke dataran tinggi tahun 1990-an setelah sulitnya pihak pabrik memperoleh lahan di dataran rendah. Hal tersebut dikarenakan kejenuhan yang dialami petani tebu.*

**Kata Kunci:** Perkebunan Tebu, Jatibarang, Brebes.

## THE DEVELOPMENT OF JATIBARANG SUGARCANE PLANTATION AT BREBES IN 1975-1996

### Abstract

*Sugar is the oldest agroindustry in Java. The great profits make many sugar factories appear, especially in Java. Discuss about sugar mills will not be separated from sugar cane plantations. Because sugar cane is one of production material in a sugar factory. One of the great sugar factories in Java is the Jatibarang. It is located at Jalan Jatibarang-Slawi, Jatibarang Sub-district, Brebes Regency, Central Java. As a large sugar factory, it certainly has extensive sugarcane plantations. The sugarcane plantations are milled in that factory is known by the name of Jatibarang plantation. This vast plantation is interesting to be analyze. The purpose of this analyze is to know how the general condition of Brebes Regency in 1975-1996. Besides that, it also to know the existing sugarcane plantations and its surrounding aspects. As well as to know how the impact of Jatibarang sugar cane plantations. The results showed that the land owned by Brebes Regency is suitable for agriculture and plantation, especially sugar cane plantation. Sugarcane plantations began to grow rapidly after the 1975 INPRES on TRI. This is because the freedom given by the government to Factory is located in the lowlands. Plantations began to move into the highlands from the 1990s after the difficulty of the plant to obtain land in the lowlands. This is due to the saturation experienced by sugarcane farmers.*

**Keyword:** Sugarcane Plantation, Jatibarang, Brebes.

### I. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai pabrik gula pasti tidak akan lepas dari tanaman tebu. Tanaman tebu pada abad ke-15, mulai diperkenalkan di Indonesia oleh imigran Cina. Mereka melakukan penanaman tebu di tanah sekitar Batavia. Pada masa tersebut gula dari tanaman tebu yang diusahakan hanya digunakan untuk konsumsi lokal saja oleh orang-orang Belanda. Setelah gula menjadi bagian penting dari ekspor, Belanda mulai menanam tebu secara mandiri. Hal ini

menjadikan industri gula menjadi bagian penting dari masa kolonialisme.

Sistem perkebunan, termasuk tebu sudah ada sejak abad ke-19 yang banyak ditemukan pada negara-negara tropis bekas jajahan, seperti Asia, Afrika, maupun Amerika Latin. Sistem ini mulai berkembang pada pertengahan abad ke-

19.<sup>1</sup>Pada tahun 1870 perkebunan tebu di Indonesia mengalami perkembangan yang baik, bersamaan dengan berakhirnya tanam paksa. Adanya sistem liberal setelah tanam paksa memunculkan wajah baru dalam dunia perkebunan. Banyak pengusaha asing yang berusaha menanamkan modal di Hindia Belanda. Penanaman modal oleh swasta didukung oleh faktor banyaknya lahan dan tenaga kerja dengan harga yang murah. Terutama dalam bidang sewa tanah untuk perkebunan.

Pada tahun 1870 pula terdapat Undang-Undang Agraria, yang memberikan kesempatan bagi pemilik modal asing untuk menyewa tanah hingga 75 tahun untuk tanah pemerintah dan 5-20 tahun untuk tanah rakyat.<sup>2</sup> Hak yang dimiliki pemilik modal asing lebih dikenal dengan hak *Erpacht*.<sup>3</sup>Pada masa pendudukan Jepang perusahaan perkebunan dikelompokkan dan dikelola berdasarkan wilayah kepulauannya. Pasca kemerdekaan sistem sewa tanah tetap ada, namun tidak menarik minat para petani untuk digunakan sebagai lahan tanaman tebu. Hal tersebut menjadikan areal tebu menurun yang berdampak pada turunnya produksi gula. Indonesia yang dulunya produksi gulanya tinggi, justru pada masa ini mengalami kekurangan gula. Indonesia bahkan harus mengimpor gula untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Pada tahun 1955 lahan tebu hanya tersisa 72. 000 hektar dengan pengolah 55 pabrik gula.<sup>4</sup>

Nasionalisasi Perusahaan Asing mulai dilakukan bulan Desember 1957. Semua perusahaan milik asing di ambil alih oleh Pemerintah Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nasional tahun 1959. Pada tahun 1958 perkebunan yang ada di Indonesia di bawah penangan Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN-Baru) dan Perusahaan Negara Perkebunan

(PNP). Sebelumnya telah berdiri PPN Lama pada tahun 1950. Politik masih cukup berpengaruh dalam perkebunan pada periode ini. Kemudian pada tahun 1957 terdapat Deklarasi Ekonomi (Dekon).<sup>5</sup>

Pada bulan April 1958, perusahaan swasta yang telah disita digabungkan menjadi enam perusahaan perdagangan negara. Dalam perkebangannya dua perusahaan dagang negara lainnya (CTC dan Usindo)<sup>6</sup> bergabung dengan enam perusahaan. Perusahaan perkebunan negara yang ada ditangani oleh PPN Baru. Pada tahun 1961 PPN Lama dan PPN Baru digabungkan menjadi badan pimpinan umum perusahaan Perusahaan-Perusahaan Negara (BPU-PPN).<sup>7</sup> Kemudian, tahun 1963 BPU-PPN menjadi empat kelompok berdasar pada jenis usahanya. Empat kelompok tersebut yaitu, BPU-PPN Karet, BPU-PPN Gula, BPU-PPN Tembakau, dan BPU-PPN Aneka Tanaman.

Pada tahun 1969 pemerintah membuat Badan Khusus Urusan Perusahaan Negara (PN). Selanjutnya tahun 1969 PN dialihkan menjadi Perseroan Terbatas (PT), berdasarkan UU No. 9/1969 dan PP. No.12/1969. Sebanyak 13 PN pada tahun 1972 telah disetujui pemerintah menjadi PT. Dari 13 PN yang telah didirikan adalah PT XI, PT XII, PT XIII, PT XXIII, dan PT XXVI. Kemudian pada tahun 1975, untuk memperbaiki keadaan gula di Indonesia, pemerintah membuat program Tebu Intensifikasi Rakyat (TRI), yang berdasarkan pada Intruksi Presdien No 9/1975.

## II. METODE PENELITIAN

Setiap melakukan penelitian ilmiah pasti akan membutuhkan metode dalam pelaksanaannya. Begitu pula dengan dengan penelitian sejarah, yang menggunakan metode sejarah. Metode sejarah sendiri merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau dengan data yang sudah diperoleh.<sup>8</sup> Metode sejarah juga dapat merekonstruksi sebanyak mungkin peristiwa masa lampau.<sup>9</sup>penelitian ini menggunakan metode

<sup>1</sup>PERHEPI dan YTKI, *Perkebunan Indonesia di Masa Depan*, ( Jakarta: Yayasan Agroekonomika, 1983), hlm. 18.

<sup>2</sup>Dibyو Prabowo, *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>3</sup>Sartono Kartodirdjo dan Joko Suryo, *Sejarah perkebunan Indonesia: Kajian Sosial ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 80.

<sup>4</sup>Selo Sumardjan, dkk, *Petani Tebu*, (jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan Dwan Gula Indonesia, 1983), hlm. 23.

<sup>5</sup>Sartono Kartodirdjo, Djoko Suryo, *op.cit.*, hlm. 174.

<sup>6</sup>PT Central Trading Corporation dan PT Usindo adalah dua perusahaan besar pada masa Perusahaan Dagang Negara (PN) tahun 1957-1966.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 176.

<sup>8</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 39.

<sup>9</sup>Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*, (Jakarta: Mega BOOK Store. 1984), hlm. 22.

sharah dengan empat tahapan dalam pengerjaanya. Empat tahapan tersebut adalah heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Tahapan pertama yaitu heuristik, yang merupakan kegiatan mencari sumber untuk mendapat data-data,

atau materi sejarah atau evidensi sejarah.<sup>10</sup> Heuristik memiliki tujuan agar kerangka pemahaman yang didapatkan berdasarkan sumber yang relevan, sehingga dapat disusun dengan jelas.<sup>11</sup> Sumber yang digunakan ini terdapat dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang sejaman dengan peristiwa sejarah. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber pendukung dalam penelitian.

Tahap selanjutnya adalah verifikasi, yaitu Setelah melakukan heuristik maka langkah selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi sendiri merupakan proses menguji kebenaran fakta atau informasi sejarah.<sup>12</sup> Verifikasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern lebih kepada untuk menguji fisik dari dokumen sejarah. Sedangkan Kritik intern lebih untuk menguji isi dari dokumen sejarah. Sehingga akan diketahui bahwa sebuah dokumen sejarah itu benar dan dapat dipercaya, kredibel dan realibel.<sup>13</sup>

Setelah tahap verifikasi adalah interpretasi, yang dapat disamakan dengan penafsiran yaitu suatu metode penelitian sejarah yang berupa penggambaran atau penafsiran fakta sejarah, baik dari lisan tulisan, gambar maupun berbagai bentuk bahasa lainnya, juga penggabungan fakta yang saling terkait untuk membentuk suatu kesinambungan fakta yang logis.<sup>14</sup> Ada dua macam interpretasi, yaitu analisis dan sintesis. Pertama, Analisis ini diartikan menguraikan. Kedua, sintesis adalah menyatukan. Menyatukan ini berarti menyatukan atau

merangkaikan kemungkinan-kemungkinan yang didapat dari analisis.

Setelah melalui tahan interpretasi, maka akan sampai pada tahap terakhir yaitu historiografi. Historiografi adalah sebuah perwujudan penelitian sejarah yang berupa tulisan sejarah, didasarkan atas fakta dari bukti atau dokumen sejarah yang sudah didapatkan. Historiografi berfungsi untuk mengkomunikasikan hasil dari rekonstruksi masa lampau.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BREBES

Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Jawa.<sup>15</sup> Ibu Kota Provinsi dari Jawa Tengah adalah Semarang. Jawa Tengah memiliki luas sekitar 32,548 km<sup>2</sup>, dengan prosentase 28,94% dari total luas Pulau Jawa. Sebagai sebuah Provinsi, Jawa Tengah terdiri dari beberapa kabupaten. Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah adalah Brebes. Sejarah perkembangan Kabupaten Brebes tidak lepas dari sejarah perkembangan Kerajaan Mataram dan Indonesia. Pada masa Kerajaan Mataram, Brebes merupakan fasal dari pada Mataram. Tahun 1670-an daerah Brebes belum berdiri sebagai sebuah kabupaten. Pada masa tersebut, Brebes masih digabungkan dengan daerah Losari dan Tegal.<sup>16</sup> Bupati yang berkuasa saat itu adalah Wirasuta. Pada masa Sunan Amangkurat II, daerah Brebes dan Losari dipisahkan dari daerah Tegal. Brebes menjadi sebuah Kabupaten pada 18 Januari 1678.<sup>17</sup> Bupati yang memerintah adalah Tumenggung Arya Suralaya. Pada tanggal tersebut, pada nantinya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Brebes.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian utara. Kabupaten tersebut terletak disepanjang pantai utara Jawa. Letak astronomis Brebes antara 6<sup>o</sup>44'56,5" - 7<sup>o</sup>21'51,8" Lintang Selatan dan antara 108<sup>o</sup>41'37,7" - 109<sup>o</sup>11'28,92" Bujur

<sup>10</sup>Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 89.

<sup>11</sup>Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 42.

<sup>12</sup>A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 66.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 72.

<sup>14</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 78.

<sup>15</sup>Majen, Purndan Soerjosoempeno, *Sejarah Kota Semarang*, (Semarang: Pemerintah Daerah Kota Madya Dati II Semarang, 1979), hlm. 1.

<sup>16</sup> Tim Penyusun Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Brebes, *Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Brebes*, (Tegal: Pemerintah Kabupaten Brebes, 1988), hlm. 36.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm 44.

Timur.<sup>18</sup> Sedangkan batas wilayahnya yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Banyumas dan Kabupaten Cilacap, sebelah timur berbatasan dengan Kota Tega dan Kabupaten Tegal, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat<sup>19</sup>

Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Brebes di tahun 1993 adalah 166.117 km<sup>2</sup>. Luas tersebut terdiri dari 17 kecamatan, dengan rincian 297 desa/kelurahan.<sup>20</sup> Tanah yang ada di Kabupaten Brebes, berdasarkan penggunaannya dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis tanah tersebut yaitu tanah sawah, tanah kering, tanah hutan negara, tanah perkebunan, dan tanah lainnya. Letak geografis yang dimiliki, menjadikan Kabupaten Brebes beriklim tropis. Terdapat dua musim dalam satu tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi antara bulan April-September, sedangkan musim penghujan antara bulan Oktober-Maret. Suhu udara rata-rata Kabupaten Brebes sekitar 21,70 °C-34 °C. Curah hujan yang ada sekitar 12,9 hari dalam setiap bulan, dengan jumlah air 1595,0 mm.<sup>21</sup>

Suhu udara dan curah hujan yang dimiliki Kabupaten Brebes menjadikannya cocok untuk wilayah perkebunan tebu, khususnya di daerah dataran rendah. Seperti yang sudah diketahui, bahwa penanaman tanaman tebu yang baik berada pada suhu 25-28 °C dan curah hujan 100 mm/tahun. Jenis tanah yang ada di Kabupaten Brebes adalah tanah Alluvial.<sup>22</sup> Jenis tanah ini sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Untuk perkebunan tebu sendiri, tanah Alluvial memang menjadi salah satu bagian penting sebagai faktor pendukung tumbuh dan

kembangnya tanaman dengan baik. Jenis tanah Alluvial tersebar di dataran rendah.

Kabupaten Brebes merupakan Kabupaten di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk cukup banyak di Jawa Tengah. Pada tahun 1961 jumlah penduduk Kabupaten Brebes adalah 892.988 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 423.816 jiwa dan perempuan 469.182 jiwa. Kemudian jumlahnya bertambah menjadi 28.516.786 jiwa, dengan rincian laki-laki 14.075.531 jiwa dan perempuan 14.441.255 jiwa. Pertambahan penduduk ini, lebih dikarenakan oleh faktor kelahiran. Penduduk Kabupaten Brebes terdiri dari berbagai kewarganegaraan. Jenis kewarganegaraan yang ada yaitu, Indonesia, Cina, Arab, India, Pakistan, dan lainnya. Pada tahun 1971 di Kabupaten Brebes berdasarkan kewarganegaraannya yaitu 1.045.246 jiwa Indonesia, 1271 jiwa b Cina, 104 jiwa Arab, 155 jiwa India, 0 jiwa Pakistan, dan 0 jiwa lainnya.<sup>23</sup> Jumlah total penduduk di Kabupaten Brebes berdasarkan kewarganegaraannya tahun tersebut yaitu 1.046.776 jiwa.

Kabupaten Brebes memiliki penduduk dengan berbagai macam agama. Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia agama yang dianut juga harus sesuai dengan agama yang diakui oleh Negara Republik Indonesia. Agama-agama tersebut yaitu Islam, Katholik, Protestan, Kristen Lainnya, Hindu, Budha, Kong Hu Tju, dan agama lainnya. Jumlah penduduk penganut agama masing-masing di Kabupaten Brebes yaitu Islam sebanyak 1.041.947 jiwa, Katholik 1.025 jiwa, Protestan 457 Jiwa, Kristen Lainnya 1.734 jiwa, Hindu 55 jiwa, Budha 66 jiwa, Kong Hu Tju 1.462 Jiwa, dan agama lainnya 30 jiwa. Total Jumlah penduduk Kabupaten Brebes berdasarkan agama pada tahun 1971 yaitu 1.046.776 jiwa.<sup>24</sup> Kabupaten Brebes pada tahun 1980 memiliki jumlah KK sebesar 271.515.<sup>25</sup>

Masyarakat Kabupaten Brebes dalam kehidupan kesehariannya masih mengutamakan kerjasama. Kerjasama tersebut dilakukan dalam keseharian masyarakatnya. Bentuk kerjasama itu diantaranya yaitu gotong royong, kerja bakti, kerjasama antar tetangga/lingkungan, dan lain sebagainya. Kehidupan sosial yang ada di Kabupaten Brebes tersebut menjadikan hubungan kekeluargaan antar masyarakatnya menjadi semakin erat. Sikap saling membantu dan saling menghormati membuat

<sup>18</sup>Kantor BPS Kabupaten Brebes, *Kabupaten Brebes dalam Angka 1993*, (Brebes: Kantor Statistik BPS Kabupaten Brebes, 1993), hlm. 1.

<sup>19</sup>Kantor BPS Kabupaten Brebes, *Kabupaten Brebes dalam Angka 1994*, (Brebes: Kantor Statistik BPS Kabupaten Brebes, 1994), hlm. 1.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>21</sup>Suwarsito dan Anang Widhi Nirwansyah, *Karakteristik Geofisik di Kabupaten Brebes Berbasis Teknologi Sistem Informasi Geografi untuk Pengembangan Budidaya Tambak Udang, UAD*, 18 Februari 2017, hlm. 409.

<sup>22</sup>UMY, *Gambaran Umum Kabupaten Brebes*, repository umy, 2016.

<sup>23</sup>Biro Pusat Statistik Jakarta, *Sensus Penduduk 1971: Penduduk Jawa Tengah*, (Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1974), hlm. 37.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 47.

<sup>25</sup>Biro Pusat Statistik Jakarta, *Penduduk Provinsi Jateng: Hasil Sensus Penduduk 1980*, (Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1983), hlm.157.

kehidupan mereka menjadi aman dan damai. Sehingga, dapat meminimalisasi pertentangan antar sesama masyarakat.

Berdasarkan sensus penduduk di Jawa Tengah tahun 1980, jumlah bangunan fisik di Kabupaten Brebes sebanyak 271.515 bangunan. Jumlah bangunan fisik ini terdiri dari 263.040 bangunan tunggal, 7.356 bangunan kopel, 998 bangunan gandeng banyak, dan 121 tak terjawab jenis bangunannya. Sensus tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes pada tahun 1980 memiliki jumlah bangunan fisik terbanyak ke-2 setelah Kabupaten Cilacap. Jumlah bangunan fisik Kabupaten Cilacap adalah 272.321.<sup>26</sup>Kabupaten Brebes dalam melakukan pembangunan menggunakan pendapatan asli daerahnya. Pada tahun 1983/1984 pendapatan asli daerah mencapai Rp.523.338.000,00,-. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Brebes dibagi dalam beberapa jenis proyek.

Sektor penopang kehidupan ekonomi Kabupaten Brebes adalah pertanian dan perkebunan. Tanaman yang ditanam pada sektor pertanian meliputi, padi, bawang merah, jagung, kacang dan lain sebagainya. Sektor perkebunannya adalah tebu, teh, sayuran dan lain sebagainya. sektor pertanian dan perkebunan tebu biasanya berada di dataran rendah, sedangkan sektor perkebunan, yaitu teh dan sayuran terletak di dataran tinggi. Hal ini dapat dilihat pada data sensus penduduk pada tahun 1971 di Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa jumlah pekerja pada dua sektor ini adalah 271.136 jiwa. Kemudian pada sektor-sektor lain yaitu pertambangan dan penggalian 9 jiwa, industri pengolahan 21.005 jiwa, listrik dan air 110 jiwa, bangunan 4.105 jiwa, perdagangan, rumah makan dan hotel 51.068 jiwa, angkutan, penyimpanan dan komunikasi 5.509 jiwa, keuangan, asuransi dan lain-lain 295 jiwa, jasa-jasa kemasyarakatan dan lain-lain 30.689 jiwa, dan kegiatan tidak/belum jelas 5.552 jiwa. Berikut adalah data rincian mengenai pekerjaan masyarakat Kabupaten Brebes.

Pada sektor pertanian, terdapat tiga tehnis dalam sistem pengairan. Ketiga sistem tersebut adalah diari secara tehnis, diari setengah tehnis, dan diari secara sederhana. Luas lahan yang diari secara tehnis 43.157 ha, secara setengah tehnis 7.147 ha, dan secara sederhana 12.260 ha.<sup>27</sup> Pertanian yang berkembang di Kabupaten Brebes adalah padi dan Bawang merah. Sedangkan dalam sektor berkembang di Kabupaten Brebes jenis tanaman yang ditanam

adalah cengkih, kelapa, kapok randu, mete, teh, kopi, mlinjo, paneli, dan tebu. Tanaman perkebunan yang berkebunan di Kabupaten Brebes adalah tebu. Hal tersebut terjadi sebelum tahun 1990-an, sebelum terjadi kejenuhan petani terhadap TRI, yang dianggap merugikan mereka. Berikut adalah data rincian perkebunan yang ada di Kabupaten Brebes. Bidang ekonomi Kabupaten Brebes, selain pada pertanian dan perkebunan juga didukung sektor peternakan perikanan, dan pertambangan.

## B. PERKEBUNAN TEBU JATIBARANG TAHUN 1975-1996

Tebu merupakan tanaman yang ditanam untuk bahan utama pembuatan gula. Tebu adalah jenis tanaman rerumputan yang hanya dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis, antara 39<sup>0</sup> Lintang Utara dan 35<sup>0</sup> Lintang Selatan.<sup>28</sup> Tanaman tebu dapat dipanen setelah berumur sekitar 14 bulan. Tanaman tersebut banyak di budidayakan di daerah Sumatra dan Jawa, terutama oleh Pabrik-Pabrik Gula. Tanaman tebu terdiri dari beberapa jenis, yaitu tebu PS 8, PS 57, PS 59, PS 63, PS 62, POJ 3016, POJ 2961, dan POJ 3067. Kesemua tebu ini dibedakan berdasarkan umur, jenis tanah, dan pupuk yang digunakan. Jenis tebu yang ditanam di Kabupaten Brebes adalah PS 57 dan PS 59.

Penanaman tebu di perkebunan Jatibarang terdiri dari beberapa proses, mulai pembukaan lahan, perawatan tanaman hingga masa panennya. Proses tersebutawali dengan persiapan ajir. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan tanah, yang meliputi keduk got keliling, kedok got belean, kedok got mujur, membuat bedeng, dan membuat garpu.<sup>29</sup>Proses setelah pembukaan tanah adalah penanaman, yang terdiri dari turun tanah, meratakan kasuran, tanam tebu, dan sulam tebu. Tebu yang telah berhasil ditanam kemudian diberi pupuk, untuk mendukung pertumbuhannya. Proses berikutnya adalah bubut rumput, yaitu mencabuti rumput liar yang mengganggu tanaman, menguras got, kletek daun kering, dan ikat tebu yang roboh.<sup>30</sup>Setelah semua proses dilakukan, barulah tebu siap dipanen untuk dioleh menjadi gula. Tanaman tebu dapat dipanen pada usia 12-14 bulan.<sup>31</sup>

<sup>28</sup>Bank Bumi Daya, *Suatu Tinjauan Mengenai Produksi dan Pemasaran Gula di Indonesia*, (Jakarta: Bank Bumi Daya, 1993), hlm. 15.

<sup>29</sup>Wiyoko, Wawancara tanggal 16 Maret 2018.

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

<sup>26</sup>Biro Pusat Statistik Jakarta, *op.cit.*, hlm. 154.

<sup>27</sup>Hari Jadi Kabupaten Brebes, *op.cit.*, hlm. 172.

Bagian terpenting lain dari penanaman tebu pada perkebunan adalah pengairan. Pengairan dilakukan pada masa pertumbuhan tebu, sedangkan pada waktu masak tebu harus dalam keadaan kering. Terdapat hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengairan, yaitu dengan memperhatikan jenis lahan yang digunakan. Pada Kabupaten Brebes sendiri luas lahan pada tahun 1988 adalah 213.000 ha. Luas tanah tersebut terdiri dari 20.000 ha tegalan, 100.000 ha tadah hujan, dan 93.000 hektar sulit air.<sup>32</sup> Pengairan perkebunan tebu Jatibarang berasal dari Kali Pemali. Sebelum musim tanam tebu, terlebih dulu pihak pabrik bekerjasama dengan pihak pengairan di Brebes agar tidak terkendala pada saat proses sudah berjalan.

Pengairan lahan perkebunan tebu Jatibarang berasal dari Kali Pemali. Untuk aliran irigasi yang digunakan sama dengan irigasi pada tanaman pertanian. Pengairan pada tanaman tebu dan pertanian dilakukan secara bergantian. Malam hari digunakan untuk tanaman tebu, untuk siang hari digunakan untuk tanaman pertanian. Sedangkan untuk lahan yang tidak dilewati jalur irigasi, biasanya akan digunakan pompa air, untuk mempermudah irigasi yang dilakukan. Pengairan perkebunan tebu Jatibarang berbeda setelah tahun 1990-an. Hal tersebut dikarenakan lahan perkebunan yang dimiliki, tidak lagi pada dataran rendah. Dataran rendah lebih digunakan petani untuk menanam tanaman pertanian. PG menghadapi masalah yang demikian, dengan terpaksa harus mencari lahan yang tetap dapat digunakan untuk menanam tebu.

PG menggunakan lahan di daerah dataran tinggi untuk lahan perkebunannya. Pengairan untuk daerah dataran tinggi sama dengan pengairan yang sudah ada untuk pertanian daerah tersebut. Pengairan berasal dari Kali Pemali dan beberapa sungai kecil yang mengalir disana (Sungai Keruh, Pedes, Glagah, Cigunung, Cibinong, Prupuk, Erang dan Rambatan).<sup>33</sup> Terdapat juga sumber mata air yang berasal dari Gunung Slamet. Sumber mata air tersebut, dibendung dalam Waduk Penjalin. Waduk tersebut berada di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Lahan perkebunan tebu Jatibarang di Brebes berdasarkan kepemilikannya dibedakan menjadi dua,

---

<sup>32</sup>Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Data Areal Lahan Kering wilayah Kerja PG Jatibarang*, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No. 112.

<sup>33</sup>Kantor BPS Kabupaten Brebes, *Laporan Monografi dan Data Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes*, (Brebes: Kantor BPS Kabupaten Brebes, 1993), hlm. 4.

yaitu lahan sewa dan lahan TRI milik petani. Sebelum tahun 1975 adanya Intruksi Presiden mengenai TRI, lahan perkebunan tebu Jatibarang hanya menggunakan lahan sewa. Program TRI di PG Jatibarang tidak dapat langsung diterapkan pada tahun 1975. Hal tersebut dikarenakan belum adanya keketetapan yang mengatur tentang TRI. Intruksi Presiden 1975 menjadikan, lahan perkebunan bertambah luas. Petani banyak yang mengusahakan lahannya untuk perkebunan tebu. Banyak petani yang mengusahakan lahannya untuk ditanami tebu. Pada tahun 1973 luas lahan perkebunan Tebu Jatibarang adalah 1.453.767 ha. Luas perkebunan mengalami peningkatan di tahun 1977 menjadi 1.748.005 ha.<sup>34</sup>

Pada lahan sewa perkebunan tebu Jatibarang, tebu yang dihasilkan untuk produksi gula mulai dari penanaman, perawatan dan pemanenan dilakukan oleh pihak pabrik. Sewa tanah biasanya dilakukan tiga bulan sebelum masa tanam tebu. Untuk lahan sewa, per ha dihargai dengan RP 125.000,00 untuk satu tahun pada 1980.<sup>35</sup> Namun, dalam kenyataannya masa sewa bisa lebih dari satu tahun. Pembayaran dilakukan dengan pengelompokan pada setiap desa.<sup>36</sup> Pada setiap desa, masih terdapat kelompok-kelompok tani, yang dalam hubungannya lebih dekat terhadap petani.

Sewa tanah yang dilakukan sebelum tahun 1990-an, tidak mengalami kesulitan. Hal tersebut dikarenakan campur tangan pemerintah yang besar dalam pelaksanaannya. Sehingga pihak pabrik tidak kesulitan dalam memperoleh bahan produksi. Pemerintah sudah menetapkan berapa luas yang akan dipakai untuk lahan perkebunan tebu pada setiap desa. Campur tangan ini, yang menjadikan rakyat mau tidak mau harus tetap menyerahkan tanahnya. TRI di PG Jatibarang tahun 1975, menjadikan lahan perkebunan semakin bertambah luas. Rakyat sangat tertarik dengan program yang dicanangkan pemerintah. Ketertarikan rakyat hanya terjadi pada awal kebijakan dilaksanakan hingga tahun 1990-an.<sup>37</sup>

Tebu bahan utama pembuatan gula di Pabrik Gula Jatibarang selain diperoleh dari sewa tanah juga diperoleh dari TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi). TRI

---

<sup>34</sup>Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Rekapitulasi Taksasi Tebu yang di Tebang PG Jatibarang Tahun 1976/1977*, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No.249.

<sup>35</sup>Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Pembayaran Sewa Tanah Tebu Giling Tahun 1980/1981 Tahap 1*, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No.152.

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>Wiyoko, Wawancara tanggal 16 Maret 2018.

sendiri di PG Jatibarang terdapat tiga jenis yaitu, TRIT (Tebu Rakyat Tegalan), TRIS (Tebu Rakyat Sawah) dan TRB (Tebu Rakyat Bebas). Tebu yang dihasilkan ini ditanam dan dirawat oleh petani secara individu. Peran petani dalam Tri sangat besar, dibandingkan dengan tebu lahan sewa. Tebu yang telah siap panen, akan diserahkan petani kepada pihak Pabrik. Sebelum penyerahan tebu terlebih dahulu dibuat surat perjanjian antara pihak petani dan pabrik. Surat perjanjian ini berisi beberapa syarat dan ketentuan yang perlu diketahui.<sup>38</sup> Pembayaran tebu dalam TRI dilakukan dengan penghitungan berdasarkan rendemen yang dihasilkan. Rendemen inilah yang kemudian diolah menjadi gula. Satu kwintal gula dihargai sebesar Rp 35.000,- tahun 1982. Pembayaran tidak dilakukan pada satu persatu petani, melainkan dalam satu kelompok tani. Penamaan kelompok tani tersebut, biasanya berdasarkan nama salah satu petani dalam kelompok ataupun KUD yang tugaskan oleh pabrik gula. Luas areal perkebunan tebu Jatibarang dari TRI di daerah Brebes cukup luas. Pada tahun 1986 luas perkebunan TRI mencapai 2.314.805 Ha. Luasnya mengalami penurunan di tahun 1987 yaitu 2.010.247 Ha. Meningkat lagi di tahun 1988 sebesar 358.967 Ha sehingga menjadi 2.369.214 Ha. Luas yang ada ini meliputi luas areal penanaman tebu maupun pembibitannya.

Produksi dalam PG Jatibarang meliputi terdiri dari 4 komponen, yaitu produksi gula, alkohol, spiritus, dan tetes.<sup>39</sup> Keempat komponen tersebut memiliki peran penting dalam produksi yang dilakukan. Produksi gula memiliki 3 faktor yang dapat mempengaruhi produksi. Faktor-faktor tersebut adalah areal perkebunan tebu, produksi tebu, dan rendemen yang dihasilkan. Faktor penentu dari produksi adalah bahan bakunya. Tebu sebagai bahan baku pembuatan gula menjadi penentu bagaimana produksi dalam suatu pabrik gula. Persediaan tebu dalam suatu pabrik gula sangat berperan dalam kelancaran produksinya. PG Jatibarang sebelum tahun 1990-an, tidak mengalami kesulitan dalam menyediakan bahan baku produksi.<sup>40</sup> Hal tersebut dikarenakan rakyat masih tertarik untuk menanam tebu di lahannya. Kelancaran juga didukung dengan adanya INPRES No. 9 Tahun 1975 mengenai

Program TRI, untuk penyediaan tebu PG Jatibarang sama sekali tidak mengalami kesulitan.<sup>41</sup> Pada tahun 1977 produksi tebu yang dihasilkan mencapai 913 kwintal, dengan produksi kristalnya adalah 105,30 kwintal.<sup>42</sup> Hal ini menunjukkan bahwa produksi di tahun tersebut tidak mengalami permasalahan.

Suatu perusahaan dalam melakukan produksi pasti memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Begitu pula dengan produksi PG Jatibarang. Penghitungan laba PG Jatibarang dilakukan dengan melakukan pengurangan pada sektor pendapatan dan sektor biaya yang dikeluarkan. Pengurangan tersebut akan diperoleh hasil usaha atau laba dari produksi.<sup>43</sup> Sektor pendapatan diperoleh dari penjualan gula, alkohol, tetes dan lain-lain. Sektor biaya yang digunakan PG terdiri dari selisih persediaan awal/akhir, biaya produksi gula, biaya produksi alkohol/spiritus, biaya kantor direksi, bunga, harga pokok tetes dan lain-lain. Pihak PTP XV-XVI (PERSERO) juga berperan dalam peningkatan produksi pada PG-PG di wilayahnya. Pada setiap tahunnya PTP XV-XVI (PERSERO), membuat peringkat produktivitas.<sup>44</sup>

Hasil tebu yang ada tidak menentukan rendemen dan hasil kristal yang ada. Pada bagian hasil tebu, peringkat yang dimiliki PG Jatibarang dari tahun 1986-1989 selalu mengalami penurunan. Namun hal ini berbalik dengan peringkat rendemen tebu yang dihasilkan. Pada tahun 1986-1989 peringkat rendemen tebu PG Jatibarang justru mengalami peningkatan. Rendemen tebu yang dimiliki PG Jatibarang dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan PG-PG lain di wilayah PTP XV-XVI (PERSERO).<sup>45</sup> Tahun 1986-1989 rendemen

<sup>41</sup>Selo Soemardjan, Dkk, *Petani Tebu: Laporan Penelitian Tentang Masalah-Masalah dalam Pelaksanaan Program TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) Di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat*, (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial dan Dewan Gula Indonesia, 1983), hlm. 80.

<sup>42</sup>Depo Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Taksasi Maret Tanggal 4 April 1977*, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No. 248.

<sup>43</sup>Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Ringkasan Laporan Tahunan Tahun 1984*, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No. 190.

<sup>44</sup>Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Peringkat Produktivitas Lahan Tebu PG-PG XV-XVI (Persero) M.T.T.: 1988/198*, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No. 193.

<sup>38</sup>Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Surat Perjanjian Pengelolaan TRI Pola Khusus Musim Tanam 1985/1986*, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No.230.

<sup>39</sup>Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Ringkasan Laporan Tahunan Tahun 1984*, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No. 190.

<sup>40</sup>Sudikno, wawancara tanggal 18 Maret 2018.

<sup>45</sup>Rasyid, Wawancara tanggal 17 Maret 2018.

yang dimiliki antara 8,93-9,60 %. Hasil kristal dari tahun 1986-1989 terus mengalami penurunan, baik dalam peringkat maupun angkanya.<sup>46</sup> Penurunan yang terjadi pada hasil tebu dan hasil kristal PG Jatibarang lebih dikarenakan kurangnya lahan untuk penanaman tebu. Pada tahun 1986 petani tebu sudah mulai meninggalkan tanaman tebu. Hal tersebut dikarenakan tanaman tebu tidak begitu memberikan keuntungan bagi para petani. Petani lebih memilih menggunakan lahannya untuk ditanami tanaman bawang merah, padi, jagung dan tanaman lainnya.<sup>47</sup> Penurunan peringkat yang ada, juga pasti berdampak pada penurunan produksi pada PG Jatibarang. Penanaman dan perawatan yang kurang baik, juga berpengaruh besar dalam penurunan hasil tebu.

Setelah proses produksi, maka akan dilanjutkan dengan proses distribusi. Distribusi merupakan proses penyaluran barang hasil produksi kepada konsumen. PG Jatibarang mendistribusikan hasil produksi gulanya terutama untuk masyarakat sekitar. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat sekitar terjamin kebutuhan gulanya.<sup>48</sup> Baru kemudian di pasarkan ke seluruh wilayah disekitar area Brebes. Pemasaran yang demikian terjadi sebelum adanya INPRES NO. 9 tahun 1975. INPRES NO. 9 Tahun 1975, memberikan perubahan dalam pendistribusian gula.

Lebih lanjut dalam SK Menteri Pertanian mengenai Program TRI, di sampaikan bahwa semua gula yang dihasilkan pabrik, termasuk gula bagian petani dibeli oleh pemerintah dengan harga yang cukup baik, untuk kelancaran TRI. Untuk menghindari adanya ijon, pada hasil gula petani, maka dikeluarkan SK Menteri Pertanian No. 022/SK/Mentan/BPB/1975.<sup>49</sup> SK tersebut mengenai produksi gula dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. Hingga tahun 1979 pembelian gula tetap dikuasai oleh pemerintah. Pembelian dilakukan melalui pabrik gula dengan dana dari Bank Bumi Daya, yang bertindak sebagai pemegang stock pemerintah. KUD juga diberikan peran besar dalam pemasaran gula petani pada masa ini. Pemasaran dilakukan misalnya dengan melakukan pelelangan gula. Pada tahun 1981, pemerintah memberikan kebijakan bahwa semua gula baik dari hasil pabrik maupun dari petani dibeli oleh pemerintah melalui BULOG. Pemerintah dalam melakukan pembelian gula, terlebih dahulu membuat standart harga. Harga yang dibuat pemerintah harus seimbang antara daya jual dan daya beli masyarakat.

Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada ketimpangan harga. Pada tahun 1981 harga gula mencapai Rp. 35.000,00 untuk setiap kuintalnya.<sup>50</sup>

Tenaga Kerja yang ada Perkebunan tebu jatibarang terdiri dari karyawan tetap harian dan bulanan, serta karyawan lepas harian. Gaji untuk para karyawan tetap Perkebunan Jatibarang ditentukan oleh bagian kerja dan golongannya, seperti misalnya karyawan Jurutulis K1.I golongan III A gaji pokok sebesar 7.778,90, juru gambar golongan III A gaji sebesar 7.205,94, mandor kebun golongan II B gaji sebesar 6.075,90, dan lain sebagainya.<sup>51</sup> Perekrutan karyawan tetap kebanyakan berasal dari keluarga dari pihak pegawai tetap yang terlebih dahulu bekerja di Pabrik. Karyawan tetap harian, semuanya bekerja dalam bidang yang sama dan dalam satu golongan.<sup>52</sup> Upah pokok yang mereka terima juga sama. Upah karyawan harian tetap PG. Jatibarang di Brebes tahun 1977 4.741,00. Para karyawan wajib menyerahkan uang iuran Astek sebesar 2,54%, untuk karyawan harian tetap sebesar 369,97.<sup>53</sup> Pada tahun 1984 karyawan harian tetap mendapat kenaikan gaji sebesar 36% dari gaji pokoknya. Kenaikan ini berdasarkan atas SK Menteri Pertanian RI No. 410/06/Pert/U/1984 tanggal 2 April 1984.

Selain karyawan bulanan tetap dan harian tetap juga terdapat karyawan lepas harian perkebunan PG Jatibarang. Karyawan lepas harian merupakan karyawan yang bekerja dalam waktu tertentu sesuai kebutuhan perusahaan yang hubungan kerjanya diadakan dari hari ke hari serta diberikan upah harian secara tetap. Pemberian upah disesuaikan dengan surat keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja No.525/Kpts/Kp.630/8/93 dan Kep.341.D/MEN/93, tanggal 5 Agustus 1993 beserta peraturan penyempurnaannya.<sup>54</sup> Ketetapan tersebut diharapkan dapat diperoleh kelayakan hidup bagi

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 82.

<sup>51</sup>Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Perhitungan Iuran Astek PG. Jatibarang Karyawan I kampanye*, hlm.5-6, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No. 258.

<sup>52</sup>Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Perhitungan Iuran Astek PG. Jatibarang Karyawan I kampanye*, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No.258.

<sup>53</sup>*Ibid*.

<sup>54</sup>Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Surat Perjanjian Kerja Karyawan harian Borong PT Perkebunan XV-XVI (PERSERO) Pabrik Gula Jatibarang*, No.: XX-KONTR/94.052., Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No.252.

<sup>46</sup>*Ibid*.

<sup>47</sup>Darjan, Wawancara tanggal 5 Mei 2018.

<sup>48</sup>H. Aswantari, Wawancara tanggal 6 Mei 2018.

<sup>49</sup>*Ibid*.

para karyawan lepas buruh. Pada tahun 1984 karyawan lepas memperoleh kenaikan gaji sebesar 41,5% dari gaji pokok. Kenaikan gaji tersebut berdasarkan atas SKB Mentan-Menaker No.TU 410/129/Kpts/3/1984, tanggal 12 Maret 1984. Pada tahun 1990-an gaji yang diperoleh pegawai harian lepas sekitar Rp. 33.000 perbulan.

Gaji yang diperoleh karyawan tetap harian dan bulanan, serta karyawan lepas harian berbeda jumlahnya di tahun yang sama. Hal ini berakibat pada kesejahteraan yang di dapat tidak sama. Karyawan tetap harian dan bulanan memiliki kesejahteraan hidup yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan gaji yang mereka terima jumlahnya cukup besar. Gaji tersebut tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan primer saja. Kebutuhan sekunder dan tersier pun dapat mereka penuhi. Berbeda dengan karyawan lepas harian yang kesejahteraannya kurang. Gaji yang didapat karyawan lepas harian, hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan pokok saja. Gaji yang pas-pasan harus mereka gunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Kesejahteraan yang di dapat oleh para karyawan dapat dilihat dari gaji yang didapat dengan harga bahan makanan.

Transportasi dalam perkebunan tebu digunakan untuk mengangkut tebu hasil penen ke pabrik. Pengangkutan tebu pada Perkebunan Jatibarang dilakukan menggunakan truck dan lori. Pengangkutan tebu dengan truck biasanya digunakan untuk perkebunan yang letaknya jauh dari pabrik dan tidak dilalui jalur lori. Pengangkutan tebu dengan alat transportasi truck, biasanya dilakukan kerjasama dengan perusahaan angkutan.<sup>55</sup> Sebelum musim tebang biasanya pihak pabrik akan melakukan pelelangan dengan pihak perusahaan angkutan Truck, guna pengangkutan tebu. Hal ini seperti kerjasama antara PG. Jatibarang dengan CV Karya Bersama, yang berada di Sragi Pekalongan tahun 1988.<sup>56</sup> Pengangkutan ini terdapat dua jenis, yaitu untuk angkutan tebu dan angkutan penebang. Mengenai harga sewa truck, pada tahun 1988 sebesar Rp. 10.000,- perhari pulang-pergi. Pada angkut penebang terdapat catatan penebang yang diangkut sebanyak ± 60 orang. Jumlah pembayaran tersebut sudah termasuk bahan bakar, minyak pelumas, uang sopir dan kernet, serta surat ijin angkutan. Pembayaran dari

pihak PG Jatibarang terhadap perusahaan angkutan dilakukan 2 minggu sekali.<sup>57</sup>

Alat angkut lain yang digunakan pada perkebunan tebu adalah lori. Lori merupakan kereta api mini, yang berfungsi sebagai pengangkut tebu dari perkebunan ke pabrik. Lori digunakan untuk mengangkut tebu pada perkebunan yang dekat dengan pabrik dan dilalui jalur lori. Lori sendiri banyak digunakan di pabrik-pabrik gula karena keefesiensinya dalam beroperasi. Keefesiensian ini pula yang menjadikan Pabrik Gula Jatibarang, hingga tahun 1984 masih memilih lori untuk pengangkutan tebu. Pada tahun 1984 jalan yang dilewati lori di Perkebunan Tebu Jatibarang tetap dirawat dengan baik.<sup>58</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari adanya Anggaran Biaya untuk pemeliharaan jalan lori. Penggunaan lori mulai tidak digunakan setelah tahun 1990-an. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan lahan perkebunan PG Jatibarang berada di daerah dataran tinggi Brebes.

### C. DAMPAK SOSIAL EKONOMI PERKEBUNAN TEBU JATIBARANG

Dampak sosial dari adanya perkebunan tebu Jatibarang adalah mengenai upah karyawan dan migrasi. Mengenai upah karyawan, sejak masa Hindia Belanda sudah menjadi permasalahan yang cukup serius. Pada masa Hindia Belanda upah yang diberikan oleh pihak Pabrik kepada karyawan dapat dikatakan sangat rendah. Hal ini dikarenakan pihak pabrik ingin menekan biaya pengeluaran produksi serendah mungkin.<sup>59</sup> Upah yang rendah jelas, semakin memperburuk kehidupan mereka. Hal berbeda terlihat setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Masalah upah karyawan sudah sedikit menumui titik terang. Terjadi perbaikan dari pemerintah mengenai upah karyawan pabrik.

Karyawan di perkebunan tebu sendiri terdiri dari karyawan tetap dan karyawan harian lepas.<sup>60</sup> Karyawan tetap dan karyawan harian lepas, bekerja pada pabrik dan lahan perkebunan tebu yang dimiliki

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Realisasi Biaya Produksi PG Jatibarang TT. 1983/1984 S/D. Bulan November 1984*, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No.184.

<sup>59</sup>PERHEPI dan YTKI, *Perkebunan Indonesia di Masa Depan*, (Jakarta: Yayasan Agro ekonomika, 1983), hlm. 30.

<sup>60</sup>Sekretariat Dewan Gula Indonesia, *Evaluasi Pelaksanaan Program Swasembada Gula Tahun 1990*, (Surabaya: Departemen Pertanian Republik Indonesia, 1990), hlm. 10.

<sup>55</sup>Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Realisasi biaya Produksi Tahun Tebang 1983/1984 Sd Bulan Nopember 1984*, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No.184.

<sup>56</sup>Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Surat Perjanjian Penggunaan Truck Antar Jemput Penebang, No.XX-Kontr/88.001*, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No.240.

pabrik maupun milik swasta. Lahan perkebunan milik pabrik diperoleh dari sewa tanah dari petani sekitar, atau lebih dikenal dengan program TRI Jasa (Tebu Kerjasama). Selain itu, terdapat pula perkebunan TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi), dimana tebu dikelola dikerjakan, diolah, dan dipanen oleh petani sendiri.<sup>61</sup> Perkebunan TRI mulai ada setelah adanya INPRES 1975, mengenai TRI yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hasil tebu TRI dari petani tersebut kemudian akan digiling di pabrik.

Tebu TRI Jasa di kelola dan dibiayai oleh Pabrik Gula Jatibarang. Mulai dari biaya pengelolaan lahan, perawatan tebu, hingga pemanenan tebu, murni dilakukan oleh pabrik. Pengelolaan perkebunan tersebut membutuhkan karyawan yang banyak. Karyawan yang ada pada PG Jatibarang 600-700 orang.<sup>62</sup> Jumlah karyawan ini bertambah pada musim giling, dengan adanya karyawan harian lepas menjadi 1000 karyawan.<sup>63</sup> Kesenjangan sosial sangat terlihat antara karyawan tetap dan karyawan lepas harian. Karyawan tetap biasanya terdiri dari mereka yang berada pada bagian kantor, seperti misalnya juru tulis, juru gambar, komite, serta mandor kebun dan rabuk. Kesemua karyawan tetap ini memiliki gaji yang berbeda-beda.<sup>64</sup> Gaji yang mereka peroleh didasarkan pada jenis pekerjaan dan pangkat yang dimilikinya.

Pegawai lepas harian, biasanya bekerja pada bagian lapangan di perkebunan maupun pabrik. Mereka bekerja mulai dari pembukaan lahan hingga tebu siap panen. Gaji yang diperoleh mereka dapat dikatakan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Gaji tersebut diperoleh setiap seminggu sekali, pada masa kontraknya. Pada tahun 1990-an gaji yang diperoleh pegawai lepas harian sekitar Rp. 33.000 perbulan.<sup>65</sup> Pegawai lepas harian bekerja hanya pada musim giling tebu saja. Mereka bekerja 4-6 bulan pada setiap tahunnya. Berbeda dengan karyawan tetap yang mendapat tunjangan, mereka hanya memperoleh gaji pokok saja. Gaji tersebut juga

merupakan UMR (Upah Minimum Kerja) daerah setempat.<sup>66</sup> Gaji yang mereka peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer saja.

Gaji yang diperoleh karyawan harian lepas, tidak dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. Hal tersebut dikarenakan gaji yang didapat hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Gaji yang diperoleh apabila dibandingkan dengan harga bahan kebutuhan pokok, memang hanya cukup untuk pemenuhan itu saja. Hal tersebut dapat dilihat dari harga kebutuhan pokok seperti beras. Gaji yang rendah ini berdampak pada kesulitannya pihak PG maupun swasta perkebunan sulit mendapat pegawai perkebunan tebu. Kadaan karyawan lepas harian kebun ini berbeda dengan pihak PG maupun swasta sebagai pemilik modal. Keuntungan yang didapat mereka besar, sehingga kesenjangan sosial antara karyawan kebun dan pemilik modal tidak dapat terlakkan, terutama pada tahun 1983-1989.<sup>67</sup>

Perubahan sosial juga terjadi dari adanya perkebunan PG Jatibarang. Perubahan sosial yang terjadi selalu bersumber pada keadaan spesifik dari suatu kondisi masyarakat.<sup>68</sup> Perubahan sosial tersebut misalnya pengorganisasian buruh yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam hubungan antar buruh dan majikan. Selain itu pengorganisasian buruh juga menyebabkan perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Perubahan ini melingkupi perubahan yang terdapat pada semua kegiatan yang mereka jalankan.<sup>69</sup>

Sistem buruh yang menjadikan segala sesuatu harus dibayarkan dengan uang, menjadikan budaya gotong royong yang sudah sejak dulu ada menjadi hilang. Kegiatan gotong royong masyarakat desa sesungguhnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan masyarakat kota.<sup>70</sup> Kegiatan gotong royong yang sudah lama dijalankan masyarakat Brebes pada umumnya dan masyarakat sekitar perkebunan pada

<sup>61</sup>Selo Soemardjan, Dkk, *Petani Tebu: laporan Penelitian Tentang Masalah-masalah dalam Pelaksanaan Program TRI di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat*, (Jakarta: Dewan Gula Indonesia, 1982), hlm. 51.

<sup>62</sup>Rasyid, Wawancara tanggal 17 Maret 2018.

<sup>63</sup>Wiyoko, Wawancara tanggal 16 Maret 2018.

<sup>64</sup>Depo Arsip BPAD Jawa Tengah, *Daftar Perhitungan Astek Karyawan Bg. Kampanye Tahun 1977 PG. Jatibarang*, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No.244.

<sup>65</sup>Ayub Ismail, Wawancara tanggal 17 Maret 2018.

<sup>66</sup>Agus, Wawancara tanggal 3 Mei 2018.

<sup>67</sup>Mubyarto dan Daryanti, *Gula Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 123.

<sup>68</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi dan Ruang Lingkupnya*, (Bandung: Remaja Pustaka, 1990), hlm. 187.

<sup>69</sup>Binarto, *Suatu Pengantar Geografi Desa*, (Yogyakarta: UP Strin, 1977), hlm. 33.

<sup>70</sup>Pengurus Pusat I S E I, *Mendjelang Repelita: Kertas-kertas Karya yang Diadakan dalam Kongres ke V Ikatan Sardjana Ekonomi Indonesia di Palembang, 5-8 April 1969*, (Jakarta: Pengurus Pusat I S E I, 1969), hlm. 46.

khususnya menjadi berkurang. Setelah adanya perkebunan tebu dari PG Jatibarang, masyarakat menjadi mengenal sistem perburuhan.

Perubahan pada masyarakat lebih disebabkan karena mereka sudah mengenal sistem upah. Segala sesuatu yang diukur dengan uang didorong karena adanya tuntutan ekonomi. Sistem buruh menjadikan perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan (pada perkebunan tebu buruh: karyawan, majikan: PG dan pihak swasta). Hal tersebut menjadikan terjadinya perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan lebih dikarenakan sumber daya manusia yang tidak merata pada semua tempat dan kemampuannya juga berbeda, sehingga menyebabkan terjadinya pelapisan sosial. Pelapisan masyarakat dapat didasarkan pada kekayaan, kehormatan, posisi ataupun status sosial.<sup>71</sup>

Pabrik Gula Jatibarang sebagai pabrik gula yang besar, pastinya memiliki karyawan yang banyak pula. Karyawan yang ada tersebut biasanya berasal dari warga daerah sekitar pabrik sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes sendiri dapat terpenuhi terlebih dahulu. Namun, terdapat beberapa karyawan yang berasal dari daerah luar Brebes, seperti Tegal, Semarang, Pemalang dan daerah lainnya. Sehingga dapat dikatakan migrasi yang ada di kabupaten Brebes kecil jumlahnya.<sup>72</sup> Dampak lain dalam bidang sosial adalah munculnya kelompok-kelompok tani. Kelompok tani ini yang menjadi pengkoordinir para petani TRI. Kelompok tani ini muncul setelah diterapkannya TRI di PG Jatibarang pada tahun 1975. Pada setiap kelompok tani terdapat ketua kelompoknya. Ketua yang bertanggung jawab atas kelompoknya. Selain sebagai pengkoordinir, kelompok tani juga sebagai penghubung antara petani dengan pihak pabrik, sehingga hubungannya terjalin dengan baik.

Peran KUD semakin besar setelah adanya INPRES 1975 mengenai Program TRI. Peran tersebut terutama dalam bagian kredit petani. Sejak tahun 1981 penyaluran kredit yang awalnya melalui PG, dialihkan melalui KUD. Pihak BRI memberikan kredit sepenuhnya kepada KUD bukan kepada petani. KUD lah yang kemudian memberikan kredit kepada petani. Urusan antara KUD dan petani, secara penuh menjadi tanggung jawab KUD. Selain sebagai penyalur kredit kepada petani, KUD juga berfungsi

sebagai penyalur sarana produksi, melaksanakan pendaftaran calon petani peserta TRI, membina kelompok tani, melaksanakan penebangan dan pengangkutan tebu, menyaksikan penentuan rendemen dan penimbangan tebu, serta menjual gula bagian petani kepada sub-Dolog.

Perkebunan tebu yang ada pada suatu daerah dapat mempengaruhi kehidupan ekonominya. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Dampak tersebut baik dirasakan oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat yang jauh dari perkebunan. Dampak dalam bidang ekonomi dari perkebunan tebu Jatibarang yaitu produksi pertanian dari petani setempat.<sup>73</sup> Biasanya daerah yang digunakan untuk perkebunan tebu akan mengalami penurunan produksi pertanian.<sup>74</sup> Hal tersebut dikarenakan karena adanya penanaman tebu, baik itu sewa maupun ditanaman sendiri. Penanaman tebu yang dilakukan, menjadikan pertanian tidak dapat dilakukan sepanjang tahun. Terdapat sistem pergantian penanaman antara tanaman tebu dan pertanian. Setelah lahan selesai digunakan untuk perkebunan tebu selama  $\pm 1,4$  tahun, kemudian masa berikutnya akan ditanami tanaman pertanian.<sup>75</sup> Hal tersebut dilakukan berulang-ulang secara terus menerus. Pergantian penanaman yang dilakukan, menjadikan hasil produksi antara pertanian dan perkebunan tebu tetap stabil. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sejak tahun 1975 setelah diterapkannya TRI di PG Jatibarang produksi tebu mulai menurun, berakibat pada berkurangnya gula yang dihasilkan.<sup>76</sup>

Peran petani dalam penanaman tebu antara tahun sebelum dan sesudah diterapkannya TRI tahun 1975 mengalami perubahan.<sup>77</sup> Sebelum tahun 1975 petani dalam penanaman tebu, hanya bertindak sebagai pemilik lahan sewa. Sedikit dari petani yang melakukan penanaman tebu secara mandiri. Mereka kebanyakan hanya menyewakan lahan yang dimiliki kepada PG maupun kepada pihak swasta. Lama sewa tanah yang dilakukan biasanya 12-14 bulan.<sup>78</sup> Lahan petani yang disewakan kepada pihak PG maupun swasta, menjadikan mereka tidak memiliki kegiatan lagi dalam kesehariannya sebagai petani. Banyak dari mereka yang mencoba mencari kegiatan lain selama masa sewa tanah tersebut. Beberapa dari

<sup>73</sup>Mubyarto dan Daryanti, *op.cit.*, hlm. 104.

<sup>74</sup>Isbudi, Wawancara 18 Maret 2018.

<sup>75</sup>Sekretariat Dewan Gula Indonesia, *op.cit.*, hlm. 68.

<sup>76</sup>Sudikno, Wawancara, 18 Maret 2018.

<sup>77</sup>Mubyarto dan Daryanti, *loc.cit.*

<sup>78</sup>Sohidin, Wawancara tanggal 4 Mei 2018.

<sup>71</sup>Eva Banowati, *Geografi Sosial*,

(Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 59.

<sup>72</sup>Sudikno, Wawancara 18 Maret 2018.

mereka yang memilih untuk mencari lahan di desa lain yang tidak digunakan untuk penanaman tebu dan ada yang memilih untuk menjadi buruh pada perkebunan tebu.

Penanaman tebu pada lahan pertanian memiliki manfaat yang sangat baik terutama dalam tingkat humus tanah. Lahan pertanian yang telah dipakai untuk menanam tanaman tebu, tingkat kesuburannya meningkat sangat baik. Peningkatan kesuburan berdampak pada tanaman pertanian yang ditanam oleh para petani. Tanaman pertanian yang ditanam akan menjadi lebih baik hasilnya. Sehingga pendapatan petani dari hasil pertanian semakin meningkat. Peningkatan pendapatan menjadikan kesejahteraan dari para petani menjadi semakin baik. Dampak lain dari perkebunan tebu Jatibarang adalah banyak berdiri warung di sekitar areal perkebunan<sup>79</sup>. Warung-warung tersebut memudahkan para pekerja memperoleh tempat istirahat dan makan, pada waktu kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa areal perkebunan biasanya terletak jauh dari pusat kota. Selain para pekerja, para pemilik warung yang kebanyakan berasal dari daerah setempat juga ikut mendapat keuntungan. Membuka warung menjadikan penghasilan yang didapatkan akan lebih meningkat, sehingga kesejahteraan kehidupannya dapat tercapai.<sup>80</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan pada skripsi ini, gula merupakan bagian penting dalam perekonomian sebuah negara. Pabrik gula sebagai penghasil gula, memegang peran besar di dalamnya. Salah satu pabrik gula besar di Jawa yaitu Pabrik Gula Jatibarang yang ada di Kabupaten Brebes. Pabrik Gula tersebut terletak di Jalan Jatibarang-Slawi, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sebagai pabrik gula yang besar, sudah dapat dipastikan bahwa luas perkebunan tebu yang dimiliki juga besar pula. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dari pabrik gula.

Kabupaten Brebes berdiri sebagai kabupaten pada 18 Januari 1678. Sebelumnya pada masa Kerajaan Mataram, Brebes merupakan fasal dari kerajaan tersebut. Kabupaten Brebes terdiri dari 17 kecamatan dan 297 desa/kelurahan. Dataran Kabupaten Brebes merupakan dataran yang subur. Wilayahnya cocok digunakan untuk pertanian dan perkebunan, perkebunan yang dimaksud adalah perkebunan tebu.

Wilayah Kabupaten Brebes dibagi menjadi tiga, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan dataran pantai. Dataran rendah digunakan untuk pertanian dan perkebunan tebu, dataran tinggi digunakan untuk pertanian dan perkebunan teh, serta dataran pantai

lebih banyak digunakan untuk penanaman bawang merah. Namun, dalam perkembangannya yaitu tahun 1990-an, dataran tinggi juga digunakan untuk perkebunan tebu. Hal tersebut dikarenakan sulitnya memperoleh lahan perkebunan di daerah dataran rendah, dataran tinggi tanahnya tidak cocok untuk tanaman tebu. Akibatnya tebu yang dihasilkan kurang baik, dengan kandungan rendemen yang rendah.

Perkebunan tebu Jatibarang sejak masa Kolonial sampai sebelum diterapkannya TRI di Jatibarang dapat dikatakan stabil. Terdapat beberapa kali naik-turun dalam keberlangsungannya, namun tidak berpengaruh cukup besar dalam eksistensinya. Pada tahun 1975, berdasarkan Intruksi Presiden No 9/1975, pemerintah mencanangkan program TRI (Tebu rakyat Intensifikasi). Pada program tersebut, peran petani lebih diutamakan dalam penanaman tebu, sehingga kesejahteraan petani dapat tercapai. Pabrik Gula Jatibarang sendiri, mulai menerapkan program TRI pada tahun 1975, bersamaan dengan Inpres. Pada awal pelaksanaannya, program yang dijalankan sangat membantu pabrik dalam produksi gula. Hal tersebut dikarenakan banyaknya tebu yang ditanam para petani di lahannya, dan kemudian di setorkan pada pabrik. Petani tertarik dengan program yang di berikan pemerintah. Lahan yang mereka miliki banyak digunakan untuk perkebunan tebu, sehingga luas areal perkebunan pada masa itu cukup besar.

Program TRI yang dilakukan oleh Pabrik Jatibarang, tidak selamanya berjalan dengan lancar. Pada tahun 1990-an terjadi penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu yang merugikan pihak petani, sehingga para petani tidak mau lagi melakukan penanaman tebu. Mereka lebih memilih untuk menanam tanaman pertanian, seperti padi, jagung, bawang merah, dan lain sebagainya. Sikap petani, berdampak besar pada pabrik terutama dalam hal produksi. Penurunan luas perkebunan, menjadikan pihak pabrik mengalami kerugian yang besar. Pihak pabrik dalam mengatasi masalah ini, mencari daerah-daerah lain untuk digunakan sebagai perkebunan, meskipun daerah tersebut tidak cocok untuk tanaman tebu. Pemilihan lahan yang tidak sesuai untuk penanaman tebu, menjadikan pihak pabrik tetap mengalami kerugian. Rendemen yang dihasilkan kurang bagus, sehingga produksi gula juga ikut menurun. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga semakin banyak, dikarenakan jauhnya lahan dari pabrik tempat beroperasi. Hal tersebut berakibat pada produksi pabrik yang tiap tahunnya mengalami penurunan, hingga akhirnya melakukan penggilingan terakhir bulan Juni 2017.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya perkebunan tebu Jatibarang dalam skripsi ini, terdiri dari dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial yang timbul adalah mengenai kehidupan pegawai, terutama pegawai lepas harian yang tidak meningkat

<sup>79</sup>Erina, wawancara tanggal 18 Maret 2018.

<sup>80</sup>Sudikno, Wawancaratanggal 18 Maret 2018.

taraf hidupnya. Hal tersebut dikarenakan upah yang mereka dapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya saja. Berbeda dengan pegawai tetap, yang memiliki gaji tinggi dan mendapat tunjangan dari pabrik. Gaji kecil yang diterima pegawai lepas harian, menjadikan pihak pabrik sulit memperoleh pegawai pada masa berikutnya. Padahal pegawai ini sangat diperlukan, terutama pada musim giling.

Dampak dalam bidang sosial berikutnya adalah adanya sistem buruh yang menjadikan masyarakatnya, tidak mengenal lagi gotong royong. Segala sesuatu yang dilakukan dihitung dengan uang, sehingga hubungan anatar masyarakatnya menjadi kurang erat. Sistem buruh juga menjadikan munculnya pihak buruh dan majikan. Kedua pihak ini dalam masyarakat akan memunculkan kesenjangan sosial yang akan terkesan memunculkan kasta di dalamnya. Dampak lain dalam bidang sosial adalah, munculnya kesenjangan sosial antara petani kecil dengan pihak swasta dan pabrik. Hal ini terutama terjadi setelah diterapkannya TRI di Pabrik Gula Jatibarang tahun 1975. Karena penyelewengan dari oknum-oknum tertentu, taraf kehidupan petani kecil semakin menurun, sedangkan pihak swasta dan pabrik taraf hidupnya semakin meningkat. Hal ini pula yang menjadikan petani tidak mau lagi menggunakan lahannya untuk penanamn tebu. Akibatnya pihak pabrik, tidak dapat memenuhi kebutuhan produksinya.

Dampak selanjutnya yaitu adanya migrasi, meskipun dalam jumlah yang kecil. Perkebunan yang ada tidak menimbulkan lonjakan penduduk yang besar. hal tersebut dikarenakan karyawan yang ada, terutama karyawan lepas harian yang ada pada musim giling lebih banyak berasal dari daerah setempat. Hanya beberapa saja yang berasal dari kabupaten lain, seperti Tegal, Pemalang, dab daerah lainnya. Dampak lain yaitu munculnya kelompok-kelompok tani setelah adanya INPRES 1975. Kelompok tani ini, menjadi penghubung antara petani TRI dengan pihak pabrik. Pihak pabrik bertugas penyalur kredit dari Bank BRI kepada parapetani TRI. Namun, peran dari pabrik ini mulai hilang setelah tahun 1981. Tugas pabrik sebagai penyalur kredit digantikan oleh KUD. KUD inilah yang bertanggung jawab penuh kepada petani TRI.

Dampak ekonomi dari adanya perkebunan tebu Jatibarang berkaitan dengan produksi pertanian di daerah setempat. Biasanya pada daerah lain, perkebunan tebu mengakibatkan penurunan dalam bidang pertanian. Hal tersebut juga terjadi pada daerah Kabupaten Brebes. Namun, penurunan produksi pertanian hanya terjadi pada awal diterapkannya TRI tahun 1975. Penurunan disebabkan adanya sistem pergantian tanam antara tanaman pertanian dan tebu. Pada tahun setelah 1990-an karena kejenuhan petani dengan TRI yang tidak semestinya, petani mulai enggan melakukan

penanaman tebu. Mereka lebih senang mengusahakan lahannya untuk tanaman pertanian. Pada tahun tersebut pula produksi gula mulai mengalami penurunan tiap tahunnya.

Dampak bidang ekonomi yang lain adalah adanya peran petani yang lebih besar dalam lahan pertanian mereka. Peran besar ini terjadi setelah adanya INPRES 1975, yang memberikan kesempatan pada petani untuk mengolah lahannya sendiri untuk perkebunan tebu. Hal tersebut berdampak pada penghasilan yang mereka peroleh. Pengolahan lahan yang mereka lakukan sendiri menjadikan penghasilan yang didapat lebih maksimal. Dampak lain dalam bidang ekonomi adalah banyak berdiri warung-warung di sekitar perkebunan. Karena ramainya daerah perkebunan, maka peluang ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Masyarakat yang membuka warung akan mendapat penghasilan mereka yang lebih dari sebelumnya. Taraf hidup yang mereka miliki juga semakin membaik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Daftar Pembayaran Sewa Tanah Tebu Giling 1980/1981*, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No.82.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Rencana Biaya Garap Upsus*, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No.93.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Surat Perjanjian Sewa Tanah Kodim 0713 di Desa Songgom, Brebes*, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No.107.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Data Areal Lahan Kering wilayah Kerja PG Jatibarang*, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No. 112.

### Buku

A.B. Lopian dan Chaniago, J.R, *Di Bawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang yang Mengalaminya*, Jakarta: ANRI, 1998.

Bank Bumi Daya, *Suatu Tinjauan Mengenai Produksi dan Pemasaran Gula di Indonesia*, Jakarta: Bank Bumi Daya, 1993.

Biro Pusat Statistik Jakarta, *Sensus Penduduk 1971: Penduduk Jawa Tengah*, Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1974.

Breman, Jan, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial*, Jakarta: LP3ES, 1986.

Daliman.A., *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Dibylo Prabowo, *Penguasaan Tanah dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Pabrik Gula Jatibarang*, Semarang: Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, 2010.

Eva Banowati, *Geografi Sosial*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

F.G. Winarno, dan A.T. Prabowo, *Gula dan Pemanis Buatan*, Jakarta: Sekretariat Dewan Gula Indonesia, 1988.

Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.

14

Kantor BPS Kabupaten Brebes, *Monografi Kabupaten Brebes Tahun 1984*, (Brebes: Kantor Statistik BPS Kabupaten Brebes, 1984.

Kantor BPS Kabupaten Brebes, *Kabupaten Brebes dalam Angka 1993*, Brebes: Kantor Statistik BPS Kabupaten Brebes, 1993.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 2008.

LP3ES, *Ekonomi Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 1986.

Majen, Purn dan Soerjosoempeno, *Sejarah Kota Semarang*, Semarang: Pemerintah Daerah Kota Madya Dati II Semarang, 1979.

Mubyarto dan Daryanti, *Gula Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

Pemerintah Kabupaten Brebes, *Sejarah Kabupaten Brebes*, Brebes: Pemerintah Kabupaten Brebes, 2011.

PERHEPI dan YTKI, *Perkebunan Indonesia di Masa Depan*, Jakarta: Yayasan Agroekonomika, 1983.

Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah perkebunan Indonesia: Kajian Sosial ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

Selo Soemardjan, Dkk, *Petani Tebu: Laporan Penelitian Tentang Masalah-Masalah dalam Pelaksanaan Program TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) Di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat*, Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial dan Dewan Gula Indonesia, 1983.

PT. *Perkembangan Perkebunan Tebu... (Iftiyah) I Perkebunan XXI-XXII (Persero), Pembudidayaan Tebu di Lahan Sawah dan Tegalan*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1992.

Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, Jakarta: Bharata Karya Akasara, 1996.

Soeharso, Dkk, *Widyakarya Nasional Migrasi dan Pembangunan Regional*, Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1980.

Soemartojo, *Perkebunan Indonesia di Masa Depan*, Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1983.

Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Tim Penyusun Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Brebes, *Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Brebes*, Tegal: Pemerintah Kabupaten Brebes, 1988.

Suwarsito dan Anang Widhi Nirwansyah, *Karakteristik Geofisik di Kabupaten Brebes Berbasis Teknologi Sistem Informasi Geografi untuk Pengembangan Budidaya Tambak Udang, UAD*, 18 Februari 2017, hlm. 409.

UMY, *Gambaran Umum Kabupaten Brebes*, repository umy, 2016.

Yogyakarta, 27 Juli 2018

Pembimbing

Mudji Hartono, M. Hum.  
NIP. 19550115 1984031 001

Reviewer

Dina Dwikurniarini, M. Hum.  
NIP. 19571209 198702 2 001